

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT
TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN
WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kosentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh :

DWI PURBO RAHAYU

NIM. 17.C2.0032

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Dwi Purbo Rahayu, peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Kesehatan, NIM 17.C2.0032.

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN**"

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 15 April 2021

Yang menyatakan

Dwi Purbo Rahayu



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT TERTULIS
PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN
GROBOGAN

Diajukan oleh : Dwi Purbo Rahayu

NIM : 17.C2.0032

Tanggal disetujui : 15 April 2021

Telah setujui oleh

Pembimbing 1 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Pembimbing 2 : Rano Indradi Sudra

Pengaji 1 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Pengaji 2 : Rano Indradi Sudra

Pengaji 3 : Paulus Johannes Soepratignja

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.



Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C2.0032

TESIS

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT
TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN
WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN**

Diajukan Oleh:

DWI PURBO RAHAYU

NIM. 17.82.0032

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. B Resti Nurhayati, SH., M.Hum

Tanggal.....

29 April 2021

Pembimbing II

dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes

Tanggal...29 April 2021...

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis*) yang berjudul:
KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku.

Semarang, 15 April 2021



(Dwi Purbo Rahayu)
NIM 17.C2.0032

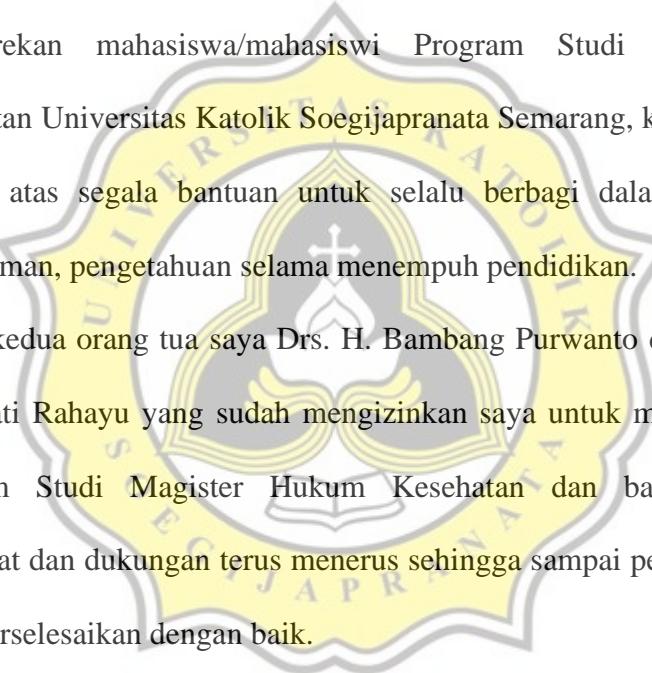
") : hilangkan yang tidak sesuai

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum dan Komunikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul "**KAJIAN YURIDIS TERHADAP INFORMED CONSENT TERTULIS PADA PEMASANGAN IMPLANT DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WIROSARI 1 KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN**"

Dalam pelaksanaan penyusun tesis ini penulis banyak mengalami banyak kendala dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, namun berkat usaha dan bimbingan dari berbagai pihak tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MSi., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina Simadujuntak, S.H, CN. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
3. Dr. Endang Wahyati, Y., SH., MH., selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. dr. Rano Indradi Sudra, M.Kes., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

- 
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Hukum Kesehatan Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek khususnya aspek ilmu hukum kesehatan.
 7. Para staf sekretariat Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang dengan sabar telah memberikan bantuan administrasi dalam proses kegiatan perkuliahan.
 8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya angkatan XXVII atas segala bantuan untuk selalu berbagi dalam suka dan duka pengalaman, pengetahuan selama menempuh pendidikan.
 9. Untuk kedua orang tua saya Drs. H. Bambang Purwanto dan Dra. Hj. Prastiyati Rahayu yang sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Hukum Kesehatan dan banyak memberikan semangat dan dukungan terus menerus sehingga sampai penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
 10. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik fisik maupun moril, sehingga terselesaikan tesis ini.
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kearah yang lebih baik.

Semarang, April 2021

Penulis

Dwi Purbo Rahayu
17. C2.0032

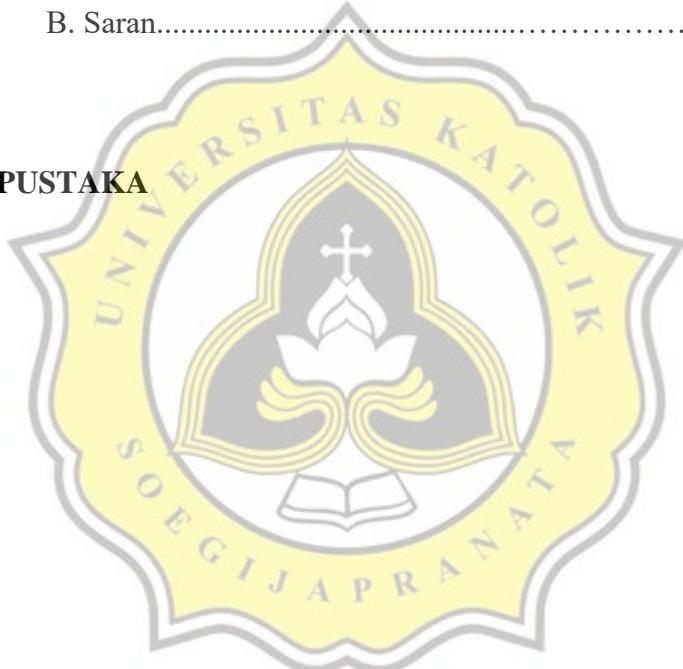


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Ii
HALAMA PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Penelitian.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Variabel dan Definisi Operasional.....	11
4. Jenis Data.....	14
5. Metode Pengumpulan Data.....	15
6. Metode Analisa Data.....	18
7. Rancangan Penyajian Tesis.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kontrasepsi.....	20
B. Implant.....	23
C. <i>Informed Consent</i>	31
D. Puskesmas.....	50
E. Tenaga Kesehatan.....	53
F. Delegasi wewenang.....	56

	G. Wewenang Pemasangan Implant.....	63
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	67
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	69
	1. Pelaksanaan <i>Informed Consent</i>	70
	2. Pemahaman Tentang <i>Informed Consent</i>	83
	3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	87
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Persetujuan tindakan medis atau *informed consent* merupakan hal yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak terkecuali dalam pemasangan implant, hal ini tentunya dapat menjadi perlindungan hukum baik bagi pasien maupun petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari aspek yuridis pelaksanaan *informed consent* sebelum pemasangan implant sebagai pemenuhan hak informasi terhadap pasien, pemahaman pasien dan petugas kesehatan terhadap *informed consent*, serta mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pemasangan implant.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan akseptor KB implant, petugas kesehatan bidan dan dokter di Puskesmas serta observasi proses pemberian lembar *informed consent* terhadap pasien yang akan melakukan pemasangan implant oleh bidan/dokter. Data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *informed consent* sebelum pemasangan implant cukup yaitu 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *informed consent* selain menghargai hak pasien juga sebagai alat bukti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, pemahaman terhadap *informed consent* dalam kategori cukup yaitu 58,3% dan baik 68,8%. Pemahaman akseptor akan pentingnya informasi yang diberikan sangat penting terkait dengan keputusan akseptor dalam mengambil keputusan untuk persetujuan *informed consent*, pemahaman tenaga kesehatan yang baik sangat berpengaruh untuk bertanggung jawab dalam melengkapi *informed consent* sesuai dengan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan. Informasi dan formulir *informed consent* yang diberikan terhadap pasien sudah lengkap dan sesuai dengan Permenkes Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Pada sisi lain kelengkapan prosedur *informed consent* memberikan perlindungan bagi bidan/dokter pelaksana. Pemberian formulir *informed consent* juga berkaitan dengan hukum perikatan yaitu Pasal 1320 BW yang intinya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dokter dan pasien.

Kata kunci: *Informed Consent*, Alat Kontrasepsi, Implant, Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAC

Approval of medical action or informed consent is an important thing in providing health services, including the implant placement, this of course can be a legal protection for both patients and health workers. This research aims to find out and understand the implementation of informed consent before implant placement as the fulfillment of patient's right to information, understanding of patients and health workers on informed consent, as well as knowing and understanding forms of legal protection for health workers in terms of implant placement.

The research was qualitative descriptive study with a sociological juridical approach. Collecting data in this study using primary data and secondary data. Primary data consisting of interviews conducted with implant family planning acceptors, as well as observation of the process of giving informed consent sheets to patients who will do implant placement by midwives / doctors, secondary data consisting of laws and regulations, books and journals.

The result of this research showed that the implementation of informed consent before implant placement was sufficient, namely 64.3%, this showed that the function of informed consent is not only respecting the patients' rights but also as a means of legal evidence if something goes wrong, the understanding of informed consent was in the sufficient category, namely 58, 3% and 68.8, while the acceptors' understanding of the importance of the information provided was very important related to acceptors' decisions in making decisions to agree the informed consent, good understanding of health workers is very influential to be responsible for completing informed consent in accordance with Regulation of the Minister of Health Number 97 of 2014 concerning health services before pregnancy, during pregnancy, childbirth, and period after delivery. The form of legal protection for health workers in implant placement in this research, the informed consent form that provided to patients is complete and in accordance with Permenkes Number 290 / Menkes/Per/III/2008 and the giving of informed consent forms related to the contract law, namely Article 1320 BW which in essence there must be an agreement between the two parties, namely the doctor and the patient

Keywords : *Informed Consent, Contraceptive implants, Community Health Centers*